



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN  
KERJA AWAL  
(RANWAL)**

**2023**

---

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rencana Kerja Awal (RANWAL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Bab II Bagian Kedua dijelaskan bahwa Penyusunan Renja Awal (RANWAL) memuat Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian diharapkan **Program dan Kegiatan dibidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Akhirnya kami sangat menyadari dalam penyusunan dalam Rencana Kerja Awal (RANWAL) tahun 2023 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Kuala Tungkal,      Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK I / IV b  
NIP 19680116 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu .....	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD .....	24
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN dan SASARAN</b>	
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional.....	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	28
<b>BAB IV TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu .....	7
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD .....	14
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD .....	24
Tabel 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	24
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup .....	29
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Awal (RANWAL) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Awal (RANWAL) Tahun 2023 yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana kita ketahui bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat ini pada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Perbub No. 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” pasal 71 ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota `menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. peraturan presiden No.30 Tahun 2020 tentang menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : Honorium perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3838)
5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4161) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4585)

9. Peraturan pemerintah No 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4815)
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
14. Peraturan menteri dalam negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi ,kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47).
17. Keputusan menteri No.050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Awal Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) Tahun pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsumuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan , program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 2023 atau sumber dana lainnya.
3. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam serta terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi :

### **- BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN Rencana Kerja (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Renja RKP

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

### **- BAB IV TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

### **- BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja kegiatan yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Restra OPD).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ***Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 (empat) bidang urusan yaitu: Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.***

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana **Tabel 2.1.** dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI RENJA DAN PENCAPAIAN RESTRA TAHUN 2020**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)			
	1	2		3	5		6		7		8		9 = 6+8		10 = 9/5*100		11 = 4+6+8			12 = 9/3
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>																				
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>		<b>Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>		<b>2736 Bulan</b>	<b>1.810.000.000</b>		<b>1.267.889.873</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>610.881.014</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>394.593.047</b>		<b>1.662.482.920</b>		<b>138,12</b>	<b>4.059.224.894</b>	<b>138,12</b>	<b>DLH</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Restra Dan Renja	72 Bulan	50.000.000	12 Bulan	48.285.000	12 Bulan	45.085.000	12 Bulan	51.575.000		99.860.000		199,72	193.230.000	199,72	DLH		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Data Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Kinerja Triwulan /Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP)	72 Bulan	110.000.000	12 Bulan	43.140.000	12 Bulan	46.390.000	12 Bulan	61.050.000		104.190.000		94,72	193.720.000	94,72	DLH		
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>																<b>DLH</b>		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peyusunan Laporan-Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan	72 Bulan	80.000.000	12 Bulan	44.020.000	12 Bulan	32.060.000	12 Bulan	46.025.000		90.045.000		112,56	166.125.000	112,56	DLH		
		<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>																<b>DLH</b>		
4	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan	72 Bulan	190.000.000	12 Bulan	111.025.000	12 Bulan	38.000.000	12 Bulan	57.050.000		168.075.000		88,46	317.100.000	88,46	DLH		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 Bulan	6.000.000	12 Bulan	709.900	12 Bulan	4.422.000	12 Bulan	5.521.983		6.231.883		103,86	11.363.783	103,86	DLH		
		Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	2.160.000						2.160.000			4.320.000		DLH		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor	72 Bulan	100.000.000	52 jenis item ATK	49.702.608	28 jenis item ATK	78.037.549	12 Bulan	129.529.554		179.232.162		179,23	306.972.319	179,23	DLH		
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makan & Minum	Tersedian Makan Minum Rapat Staf	72 Bulan	12.000.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	100.000		580.000		1.780.000		15	3.080.000	14,83	DLH		
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak Pengadaan	72 Bulan	30.000.000	12 Bulan	10.776.000	12 Bulan	2.126.494	12 Bulan	11.434.744		22.210.744		74,04	35.113.238	74,04	DLH		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)		
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	72 Bulan	800.000.000	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	86.817.000	12 Bulan	195.514.766		485.514.766	60,69	862.331.766	60,69	DLH		
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	9.000.000	12 Bulan	1.230.000	12 Bulan	870.000	12 Bulan	1.870.000		3.100.000	34,44	5.200.000	34,44	DLH		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Kebutuhan Belanja Jasa Sumber Air Dan Listrik	72 Bulan	90.000.000	12 Bulan	92.400.000	12 Bulan	93.000.000	12 Bulan	63.927.220		156.327.220	173,70	341.727.220	173,70	DLH		
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Alat -Alat Kebersihan & Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan Kantor Dan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	72 Bulan	13.000.000	12 Bulan	17.745.865	12 Bulan	18.013.071	12 Bulan	18.013.071		35.758.936	275,07	71.517.872	275,07	DLH		
		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur											-	-	-		DLH		
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	72 Bulan	180.000.000	51 unit	221.550.000	51 unit	100.199.900	12 Bulan	109.779.477		331.329.477	184,07	653.079.377	184,07	DLH		
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72 Bulan	40.000.000	mesin tik, komputer/laptop, printer, dan AC	16.200.000	12 Bulan	19.160.000	12 Bulan	19.160.000		35.360.000	88,40	70.720.000	88,40	DLH		
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	72 Bulan	50.000.000	2 unit / 2 penjaga	96.600.000	2 gedung	20.400.000	12 Bulan	84.533.319		181.133.319	362,2666	298.133.319	362,27	DLH		
		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											-	-	-		DLH		
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Dan Non PNS Beserta Perlengkapannya	72 Bulan	50.000.000	67 stel	24.320.000	64 stel	25.600.000	12 Bulan	57.600.000		81.920.000	163,84	131.840.000	163,84	DLH		
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal				12 Bulan	4.550.000						4.550.000		9.100.000		DLH		
<b>2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi &amp; Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>			<b>545.000.000</b>		<b>69.700.000</b>		<b>442.213.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>433.420.000</b>		<b>503.120.000</b>	<b>122,14</b>	<b>1.015.033.000</b>	<b>122,14</b>	<b>DLH</b>		
1	Penyusunan & Penetapan RPPLH Kab/Kota	Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Informasi Lingkungan RPPLH Kab/Kota	72 Bulan	45.000.000	2 dokumen	69.700.000	1 Dokumen RPPLH	20.950.000	12 Bulan	20.950.000		90.650.000	201,44	181.300.000	201,44	DLH		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)			
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																		
2	Pembuatan & Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Tersusunnya Dokumen Informasi Lingkungan KLHS Tata Ruang	72 Bulan	250.000.000			1 Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	208.147.500	12 Bulan	202.030.000		202.030.000		80,812	410.177.500	80,81	DLH		
3	Pembuatan & Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD		Tersusunnya Dokumen Informasi Lingkungan KLHS RPJMD/RPJMD	72 Bulan	250.000.000			1 Dokumen KLHS RPJMD/RPJMD	213.115.500	12 Bulan	210.440.000		210.440.000		84,18	423.555.500	84,18	DLH		
<b>3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>720.000.000</b>		<b>92.850.000</b>		<b>97.550.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>92.000.000</b>		<b>184.850.000</b>		<b>42,77</b>	<b>375.250.000</b>	<b>64,15</b>	<b>DLH</b>		
1	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air, Udara & Laut		Pemantauan Kualitas Badan Air Sungai	Meningkatnya Pengetahuan Sdm Terhadap Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Dan Terlaksananya Pemantauan Kualitas Limbah Cair,Perusahaan, Air Sungai	72 Bulan	60.000.000	22 perusahaan/keg. 10 sungai	34.450.000	1 kegiatan/30 perusahaan/sungai	39.500.000	12 Bulan	39.200.000		73.650.000		122,75	147.600.000	122,75	DLH	
			Mini Lokakarya Pengendalian Pencemaran										-		-			DLH		
			Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi & Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup										-		-			DLH		
2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemantauan Kreteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Dan Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup	72 Bulan	100.000.000	usaha/kegiatan, PMKS, Migas, pinang	18.200.000	10 titik/1 kali sosialisasi	18.550.000	12 Bulan	16.800.000		35.000.000		35	71.750.000	35,00	DLH	
			Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam										-		-			DLH		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)		
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Pemisoliasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Terlaksananya Pengujian Emisi/Polusi Pada Perusahaan	72 Bulan	60.000.000	8 perusahaan, 2 kota kuala tunggal	40.200.000	14 perusahaan	18.550.000	12 Bulan	16.800.000	57.000.000	95	115.750.000	95,00	DLH			
		Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan										-	-			DLH			
4	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi	Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan Sungai	72 Bulan	500.000.000			1 kegiatan	20.950.000	12 Bulan	19.200.000	19.200.000	3,84	40.150.000	3,84	DLH			
<b>4.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>Program Perlindungan &amp; Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>90.000.000</b>		<b>67.951.800</b>		<b>25.750.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>50.199.300</b>	<b>118.151.100</b>	<b>131,28</b>	<b>211.852.900</b>	<b>131,28</b>	<b>DLH</b>			
1	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Penanaman Bibit Penghijauan	Terlaksananya Penanaman Bibit Magrove Dan Penghijauan	72 Bulan	90.000.000	600 batang bibit	67.951.800	3600 bibit	25.750.000	12 Bulan	50.199.300	118.151.100	131,28	211.852.900	131,28	DLH			
<b>5.PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH)</b>		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>			<b>40.000.000</b>		<b>34.400.000</b>		<b>25.800.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.507.186.683</b>	<b>1.541.586.683</b>	<b>3853,967</b>	<b>178.679.345</b>	<b>296,20</b>	<b>DLH</b>			
1	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Adminitrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pengelolaan & Pengendalian B3 & Limbah B3	Terlaksanya Pemantauan Pengelolaan B3 & Pembinaan Usaha Skala Kecil (USK) Penghasil Limbah B3	72 Bulan	40.000.000	40 dunia usaha/kegiatan	34.400.000	45 dunia usaha/kegiatan	25.800.000	12 Bulan	84.079.345	118.479.345	296,1984	178.679.345	296,20	DLH			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									1.423.107.338									
<b>6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN &amp; IZIN PERLINDUNGAN &amp; PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>Program Pengendalian Pencemaran &amp; Perusakan Lingkungan</b>			<b>310.000.000</b>		<b>110.550.000</b>		<b>148.600.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>146.822.000</b>	<b>257.372.000</b>	<b>71,84</b>	<b>516.522.000</b>	<b>71,84</b>	<b>DLH</b>			
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan & Kewajiban Izin Lingkungan & Atau Izin PPLH	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Terlaksananya Implementasi Dokumen Lingkungan Hidup & Terlaksananya Pembahasan /Penilaian Dokumen Lingkungan	72 Bulan	45.000.000	amdal 15 dokumen UKL - UPL 30 dokumen SPPL 100 dokumen	26.650.000	30 Laporan/10 Dokumen	44.950.000	12 Bulan	44.950.000	71.600.000	159,11	143.200.000	159,11	DLH			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)		
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																	
		Koordinasi Penyusunan Amdal		72		amdal 2 dokumen UKL - UPL 20 dokumen	26.700.000					-	26.700.000			53.400.000		DLH	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan	Meningkatkan Pengetahuan SDM Terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan	72 Bulan	45.000.000			1 Kegiatan	20.950.000	12 Bulan	19.200.000		19.200.000		42,67	40.150.000	42,67	DLH	
3	Pengawasan Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Koordinasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Terlaksananya Pengawasan Usaha Kegiatan Pertambangan Batu Bara/Bantuan/Tanah Uruk	72 Bulan	45.000.000			1 Kegiatan	18.550.000	12 Bulan	18.550.000		18.550.000		41,22	37.100.000	41,22	DLH	
4	Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan & Penerapan Sanksi Upaya & Rencana PPLH	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi & Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan, Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan, Tersusunnya Buku Identifikasi Kerusakan Lingkungan	72 Bulan	175.000.000	1. dunia usaha/perusahaan 2. buah papan informasi 3. 1 dokumen	13.500.000	30 Perusahaan/4 Sosialisasi/1 buku	64.150.000	12 Bulan	64.122.000		77.622.000		44,36	155.272.000	44,36	DLH	
		Pemantauan Kerusakan Lingkungan				1 dokumen	13.500.000						13.500.000			27.000.000		DLH	
		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan				35 lapangan minyak	30.200.000						30.200.000			60.400.000		DLH	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup											-			-		DLH	
<b>7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi &amp; Sumber Daya Alam &amp; Lingkungan Hidup</b>			<b>60.000.000</b>		<b>21.720.000</b>		<b>18.550.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>16.800.000</b>		<b>38.520.000</b>		<b>64,2</b>	<b>78.790.000</b>	<b>64,20</b>	<b>DLH</b>	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)		
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																	
1	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data & Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan & Hak MHA atau Pengetahuan & Hak MHA Terkait dengan PPLH	Peningkatan Edukasi & Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Operasional Pos Pengaduan Perusakan Lingkungan & Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan & Publikasi Pengaduan Perusakan Lingkungan Hidup	72 Bulan	60.000.000	13 kecamatan	21.720.000	1 Kegiatan	18.550.000	12 Bulan	16.800.000		38.520.000		64,2	78.790.000	64,20	DLH	
<b>8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi &amp; Sumber Daya Alam &amp; Lingkungan Hidup</b>			<b>90.000.000</b>		<b>27.550.000</b>		<b>18.550.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>16.800.000</b>		<b>44.350.000</b>		<b>49,28</b>	<b>90.450.000</b>	<b>49,28</b>	<b>DLH</b>	
1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Adwiyata, Kegiatan Lintas Sektoral (P2WKSS, BBGRM)	72 Bulan	90.000.000	1. 3 kali sosialisasi 2. 1 kali untuk P2WKSS, 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & dasawisma) 3. 1 kali untuk P2WKSS, 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & dasawisma)	27.550.000	3 Kegiatan	18.550.000	12 Bulan	16.800.000		44.350.000		49,28	90.450.000	49,28	DLH	
<b>9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEMASYARAKAT</b>		<b>Program Pengendalian Pencemaran &amp; Perusakan Lingkungan</b>			<b>40.000.000</b>		<b>18.500.000</b>		<b>13.750.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12.000.000</b>		<b>30.500.000</b>		<b>76,25</b>	<b>62.750.000</b>	<b>76,25</b>	<b>DLH</b>	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Sosialisasi Proklim & Sosialisasi Kalpataru Dan Terlaksananya Koordinasi Persiapan Pemantauan Adipura	72 Bulan	40.000.000	1. 32 titik 2. (2 kali)	18.500.000	1 Sosialisasi/ 33 titik pantau	13.750.000	12 Bulan	12.000.000		30.500.000		76,25	62.750.000	76,25	DLH	
<b>10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi &amp; Sumber Daya Alam &amp; Lingkungan Hidup</b>			<b>72</b>	<b>110.000.000</b>	<b>40.890.000</b>		<b>29.900.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>26.900.000</b>		<b>67.790.000</b>		<b>66,21</b>	<b>138.580.000</b>	<b>66,21</b>	<b>DLH</b>	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)		
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Identifikasi Sumber Daya Alam & Pengembangan Data & Informasi Lingkungan	Terlaksananya Registrasi & Verifikasi Dugaan Pencemaran Bidang Lingkungan Hidup	72 Bulan	70.000.000	2 kali/kecamatan	19.690.000	3 Kegiatan	16.150.000	12 Bulan	14.900.000		34.590.000	49,41	70.430.000	49,41	DLH		
		<b>Program Pengendalian Pencemaran &amp; Perusakan Lingkungan</b>											-	-			DLH		
2	Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan & Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa & atau Penyelidikan Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Penataan Hukum Lingkungan	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Ketaatan Dunia Usaha Pada Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan	72 Bulan	40.000.000	1. 15 dunia usaha/kegiatan 2. 12 Bulan 3. 10 kali	21.200.000	15 Dunia Usaha	13.750.000	12 Bulan	12.000.000		33.200.000	83	68.150.000	83,00	DLH		
<b>11. PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			<b>8.054.314.000</b>		<b>4.291.917.804</b>		<b>7.739.888.800</b>	<b>12 Bulan</b>			<b>12.583.353.345</b>	<b>117,23</b>	<b>26.163.530.499</b>	<b>117,23</b>	<b>DLH</b>		
1	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengelolaan & Pemrosesan akhir sampah TPA/TPST/SPA Kab/kota	Peningkatan Fungsi Sungai & Drainase	Pelaksanaan Kebersihan Sungai & Drainase, Pelaksanaan Pengawasan & Pengelolaan Tpa Untuk Mewujudkan Tpa Ramah Lingkungan, Terlaksananya Pembuatan Biogas Dari Kotoran Ternak & Atau Sampah Terpenuhinya Jaminan Kesejahteraan Petugas Kebersihan	72 Bulan	680.000.000	12 Bulan	181.800.000	12 Bulan/1 TPA/2 Unit Biogas	488.949.000	12 Bulan	713.733.404		895.533.404	131,70	1.566.282.404	131,70	DLH		
		Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)				1 lokasi	315.300.000						315.300.000		630.600.000		DLH		
		Pembuatan Biogas											-		-		DLH		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	REALISAI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)			
	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006																		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan & Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan	72 Bulan	7.374.314.000			94 unit/220 petugas sampah/1 kegiatan/1 2 Bulan	7.250.939.800	12 Bulan	7.577.702.137			7.577.702.137			14.828.641.937	102,76	DLH	
		Penyediaan Sarana & Prasarana Persampahan				12 Bulan	2.591.010.000							2.591.010.000			5.182.020.000		DLH	
		Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kebersihan				51 unit	1.203.807.804							1.203.807.804			2.407.615.608		DLH	
Rata-rata capaian kinerja												1.548.370.550			1.548.370.550					
Predikat Kinerja																				
11 Program & 36 Sub Kegiatan					11.869.314.000	6.043.919.477		9.171.432.814			17.032.076.048	143,50	32.890.662.638	109						

Kuala Tungkal,

2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO,SE  
Nip.19680116 199703 1 002

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan ibu kota, tentu memiliki permasalahan Lingkungan Hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan ***Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas. Berikut tabel analisis kinerja pelayanan OPD :***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

**Berikut Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

**Tabel 2.2**  
**Analisis Kinerja Pelayanan OPD**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)	100%	Persentase Jumlah usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL) terhadap seluruh usaha / kegiatan yang wajib UKL-UPL / AMDAL	100%	100%	100%	90%	100%	100%
2	Jumlah usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	100%	persentase dunia usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	65	80	92	60	80	92
3	Jumlah usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	Persentase usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	100%	100%	90%	100%	100%
4	Luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan tanah pada periode biomassa (Ha)	100%	Persentase lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan tanah pada periode biomassa (Ha)	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah pengaduan yang diterima	100%	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	90%	100%	100%
6	Jumlah volume sampah setiap tahunnya	100%	Persentase penanganan/ pengelolaan sampah	63.003 Ton	65.000 Ton	70.000 Ton	90%	65.000 Ton	70.000 Ton

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

1. Dibidang Persampahan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama di Kota Kuala Tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ketahun selalu meningkat, volume sampah dikota kuala tungkal mencapai **11.428,2** Ton di Tahun 2021, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga juga keterbatasan dana untuk mengolah daur ulang sampah. Pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggi di daerah perkotaan sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diakibatkan karena aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan pemukiman didaerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di Kecamatan Tungkal Ilir Khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah ke jalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan – bulan tertentu. Banyak pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak terhadap lingkungan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan karena air limbah yang mengalir dipesisir sungai dan laut yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk pengukuran Titik sampling diperlukan penambahan titik sampling pengukuran udara dan air serta untuk melakukan pengukuran sendiri Indeks Tutupan Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar nilai Indeks Lingkungan yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun 2019 Indeksi Kualitas Air (IKA) 61,429, Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,12 (kualitas Baik) pengukuran ini belum ada polusi kabut atau asap, Indeks Kualitas Lahan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri masih belum pernah perhitungan sendiri dan dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi pada Tahun 2016 yakni 52,09.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir (2016 – 2021), dalam pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan

lingkungan hidup yang belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang mana belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK ) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2021-2026 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi merupakan peluang dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 ( lima ) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a) Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik – teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b) Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c) Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya.
- d) Masih kurangnya kendaraan operasional untuk kelengkapan.

## **2.4 Tabel Review Rencana Kerja Awal (RANWAL)**

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**



**2.4 Tabel Reviu Rencana Kerja Awal (Ranwal) Tahun 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
1	2	3	4	5		6		14	7	8
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	12.222.015.000	100%	13.116.915.000			DLH
	2.01 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun		7 Laporan	1.600.000.000	7 Laporan	2.000.000.000	sekretariat		DLH
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000			DLH
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	300.000.000			DLH
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000			DLH
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000			DLH
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000			DLH
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000			DLH
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000			DLH
	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD		4 Laporan	4.338.165.000	4 Laporan	4.448.415.000			DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24 Orang/bulan 3.267.915.000	24 Orang/bulan	3.267.915.000			DLH
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 Dokumen 300.250.000	2 Dokumen	300.500.000			DLH
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2 Dokumen 250.000.000	2 Dokumen	300.000.000			DLH
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	1 Dokumen 110.000.000	1 Dokumen	120.000.000			DLH
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2 Laporan 100.000.000	2 Laporan	120.000.000			DLH
	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	2 Dokumen 110.000.000	2 Dokumen	120.000.000			DLH
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4 Laporan 110.000.000	4 Laporan	120.000.000			DLH
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	2 Dokumen 90.000.000	2 Dokumen	100.000.000			DLH
2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kartu Inventarisasi</b>		<b>1 Dokumen 330.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>360.000.000</b>			DLH
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1 Dokumen 110.000.000	1 Dokumen	120.000.000			DLH
	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	14 Laporan 110.000.000	14 Laporan	120.000.000			DLH
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	8 Laporan 110.000.000	8 Laporan	120.000.000			DLH



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket 55.000.000	2 Paket	60.000.000			DLH
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1.000 Paket 110.000.000	1.100 Paket	120.000.000			DLH
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	12 Paket 60.000.000	12 Paket	70.000.000			DLH
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket 11.000.000	12 Paket	12.000.000			DLH
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket 11.000.000	12 Paket	12.000.000			DLH
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1 Dokumen 11.000.000	1 Dokumen	12.000.000			DLH
	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	12 Paket 60.000.000	12 Paket	70.000.000			DLH
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	1 Laporan 9.000.000	1 Laporan	10.000.000			DLH
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan 400.000.000	1 Laporan	450.000.000			DLH
2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD</b>		<b>1035 unit 1.715.850.000</b>	<b>34 unit</b>	<b>1.085.500.000</b>			DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	6 Unit	410.000.000	5 Unit	370.000.000		DLH
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	1 unit	470.000.000		DLH
	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100%	-	-				DLH
	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	100%	-	-				DLH
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	16 Unit	100.000.000	16 Unit	100.000.000		DLH
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	-				DLH
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%	-	-				DLH
	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100%	-	-				DLH
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-				DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi				
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)							
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	13 Unit	105.850.000	10 Unit	105.000.000			DLH
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	1.000 Unit	1.100.000.000	2 unit	40.500.000			DLH
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4 laporan	466.000.000	4 laporan	557.000.000			DLH
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000			DLH
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000			DLH
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000			DLH
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000			DLH
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		235 Unit	2.105.000.000	251 Unit	2.800.000.000			DLH
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000			DLH
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000			DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100%	4 Unit 5.000.000	5 Unit 300.000.000				DLH
	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%	15 Unit 50.000.000	17 Unit 50.000.000				DLH
	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	20 Unit 250.000.000	22 Unit 300.000.000				DLH
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	20 Unit 250.000.000	22 Unit 300.000.000				DLH
	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	1 Unit 250.000.000	1 Unit 300.000.000				DLH
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000				DLH
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	4 Unit 250.000.000	5 Unit 300.000.000				DLH
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	50 Unit 250.000.000	52 Unit 300.000.000				DLH
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	50 Unit 250.000.000	52 Unit 300.000.000				DLH
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							DLH
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	3 Dokumen 850.000.000	4Dokumen 1.015.000.000				DLH
		2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	1 dokumen 300.000.000	1 dokumen 165.000.000				DLH
			01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen 300.000.000	1 Legalisasi dokumen 165.000.000			DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi				
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)							
				2.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS		2 Dokumen	550.000.000	3 Dokumen	850.000.000			DLH
				01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	650.000.000			DLH
				02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	-	-	1 dokumen	200.000.000			DLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG		65,5/94,4/56,7/77,8/74,4	1.060.000.000	66/94,6/56,5/78,4/74,8	940.000.000			DLH
				2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2 Laporan	730.000.000	2 Laporan	760.000.000			DLH
				01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKA: 64,3 IKU : 93,68 IKTL: 52,09	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	650.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)		DLH
				02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	110.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)		DLH
				2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	terlaksananya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota		100%	150.000.000	100%	180.000.000			DLH
				01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 papan informasi	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	180.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		DLH
				02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		1 buku/dokumen						DLH



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100%						DLH
	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)		1 Dokumen	180.000.000				DLH
	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	1 Dokumen	180.000.000				DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000		DLH
	2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000		DLH
	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen	445.000.000			DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang terkelola	20 Ha	3.460.000.000	20 Ha	3.560.000.000		DLH
	05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100%						DLH
	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Terlaksana nya penanaman ( Di desa tunggal 1)	18 Unit (Taman)	1.000.000.000	18 Unit (Taman)	1.000.000.000		DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan	100%	500.000.000	100%	610.000.000		DLH

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
			2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	500.000.000	100%	610.000.000			DLH
			02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	610.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3		DLH
2	11	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		100%	460.000.000	100%	503.000.000			DLH
			2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	460.000.000	100%	503.000.000			DLH
			01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	20 Dokumen	140.000.000	25 dokumen	170.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		DLH
			02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	2 Orang	65.000.000	2 orang	70.000.000			DLH
			03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	140.000.000			DLH
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100%	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000			DLH

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		80%	200.000.000	90%	240.000.000			DLH
			2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000			DLH
			01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100%	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN		DLH
			2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina		1 Kelembagaan	100.000.000	1 Kelembagaan	120.000.000			DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi			
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)						
			01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN		DLH
2	11	08	2.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN &amp; PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup								DLH
			2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah sosialisasi/pelatihan		80%	140.000.000	90%	150.000.000			DLH
							6 sekolah	140.000.000	6 sekolah	150.000.000			DLH
			01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tunggal)	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	140.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	150.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN		DLH
2	11	09		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		70%	180.000.000	80%	200.000.000			DLH
			2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD		1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000			DLH
			01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 dokumen	1 Entitas	180.000.000	1 Entitas	200.000.000	DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN		DLH
2	11	10		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI</b>		100%		100%				DLH
								160.000.000		180.000.000			

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
			2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	160.000.000	180.000.000			DLH	
			01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	3 Dokumen	80.000.000	90.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)		DLH	
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100%	3 Dokumen	80.000.000	90.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)		DLH	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		85%	16.760.000.000	16.005.000.000			DLH	
			2.01	Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah		85%	16.760.000.000	16.005.000.000			DLH	
			01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Perbup Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018	2 Dokumen	300.000.000	-	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3		DLH	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.425 Ton/M <sup>3</sup> /320 / 19 orang	78.000 Ton	8.000.000.000	80.000 Ton	8.500.000.000		DLH
	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		10 Kelompok	160.000.000	12 Kelompok	170.000.000		DLH
	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	100%						DLH
	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 rekomendasi			1 Dokumen	185.000.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2023		Perkiraan Kebutuhan Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Kebutuhan (Rp)			
	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 TPST3R/Dumpruck 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ bacholder 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan	1.120 Unit	8.300.000.000	1.000 Unit	7.150.000.000			DLH
					37.437.015.000		37.519.915.000			

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK I/ Ivb  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain:

- a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil ;
  - b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat;
  - c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi;
  - d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek;
  - e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.
-



Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- a) *Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.*  
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagipengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.
  - b) *Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi sesara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA.* Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership Lingkungan Hidup yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).
  - c) *Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)*  
SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai
-

pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. Untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.

- d) Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.
  - e) Pengendalian beban lingkungan hidup Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
  - f) Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.
-

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh *Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2026* adalah :

**Tujuan : 1. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup**

#### **Sasaran Strategis :**

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka *Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat* menetapkan sasaran – sasaran strategis yaitu :

- 1. Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menjaga kualitas udara**
  - 2. Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menjaga kualitas air laut**
  - 3. Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan**
-

Label 3.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	100%	100%	100%	Sekretariat
			Nilai SAKIP			69,68	70	73	75	78	80	
			Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = IKA + IKU + IKTL + IKAL + IKEG	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	70,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
			Menurunkan Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup akibat dugaan pencemaran Lingkungan Hidup dan Terpenuhinya Kemampuan SDA dalam Memenuhi Daya Dukung Lingkungan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	(Pengaduan yang ditangani / Jumlah Total Pengaduan) x 100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	85	90	95	100	100	100	Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	-Uji Labor Karakteristik Limbah B3 -Inventarisir Limbah B3 -Rekomendasi Teknis Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
				$\frac{\text{Timbulan Sampah Tertangani (Ton/Tahun)}}{\text{Jumlah Potensi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)}} \times 100$	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.045,28 64.889,62	23.255,04 65.292,99	24.632,45 65.686,54	26.055,66 66.069,7	28.475,11 66.441,93	30.475,11 67.686,58	
			Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	JUK : JIL x 100 (JUK) Jumlah Usaha Kegiatan (JIL) Jumlah Izin Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**SUPARJO, SE**  
Pembina TK I/ IV b  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Renca Kerja Awal (RANWAL) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang diukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi sesuatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja Kerja Awal (RANWAL) berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Penyusunan RANWAL bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD dan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis (RESTRAS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan RANWAL berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	(Rp)		
1				2	3	4	5		6	7
X	XX	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100%</b>	<b>12.222.015.000</b>		DLH
		2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun		7 Laporan	1.600.000.000	sekretariat	DLH
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	8 Dokumen	100.000.000		DLH
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	4 Dokumen	250.000.000		DLH
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000		DLH
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2 Laporan	250.000.000		DLH
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2 Laporan	250.000.000		DLH
		2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>4.338.165.000</b>		DLH
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24 Orang/bulan	3.267.915.000		DLH
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 Dokumen	300.250.000		DLH
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2 Dokumen	250.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	1 Dokumen	110.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2 Laporan	100.000.000		DLH
			06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	2 Dokumen	110.000.000		DLH
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4 Laporan	110.000.000		DLH
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	2 Dokumen	90.000.000		DLH
		2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kartu Inventarisasi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>330.000.000</b>		DLH
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1 Dokumen	110.000.000		DLH
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	14 Laporan	110.000.000		DLH
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	8 Laporan	110.000.000		DLH
		2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pendapatan</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>440.000.000</b>		DLH
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100%	1 Laporan	110.000.000		DLH
			05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	100%	12 Laporan	110.000.000		DLH
			06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	100%	13.000 Dokumen	110.000.000		DLH
			07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	1 Dokumen	110.000.000		DLH
		2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	(Rp)		
	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90%	1 Unit	90.000.000	DLH
	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	68 Paket	60.000.000	DLH
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90%	1 Dokumen	90.000.000	DLH
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	80%	1 Dokumen	80.000.000	DLH
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	1 Dokumen	60.000.000	DLH
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70%	5 Orang	120.000.000	DLH
	<b>2.06</b>	<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>727.000.000</b>	DLH
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	55.000.000	DLH
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1.000 Paket	110.000.000	DLH
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	12 Paket	60.000.000	DLH
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket	11.000.000	DLH
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket	11.000.000	DLH
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1 Dokumen	11.000.000	DLH
	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	12 Paket	60.000.000	DLH
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	1 Laporan	9.000.000	DLH
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan	400.000.000	DLH
	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD</b>		<b>1035 unit</b>	<b>1.715.850.000</b>	DLH
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	6 Unit	410.000.000	DLH
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	16 Unit	100.000.000	DLH
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	DLH
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	13 Unit	105.850.000	DLH
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	1.000 Unit	1.100.000.000	DLH
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>4 laporan</b>	<b>466.000.000</b>	DLH
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	6.000.000	DLH
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	200.000.000	DLH
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	180.000.000	DLH
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	80.000.000	DLH
	<b>02:09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>235 Unit</b>	<b>2.105.000.000</b>	DLH



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	(Rp)		
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	35 Unit	250.000.000	DLH
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	35 Unit	250.000.000	DLH
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100%	4 Unit	5.000.000	DLH
	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%	15 Unit	50.000.000	DLH
	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	20 Unit	250.000.000	DLH
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	20 Unit	250.000.000	DLH
	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	1 Unit	250.000.000	DLH
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	1 Unit	50.000.000	DLH
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	4 Unit	250.000.000	DLH
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	50 Unit	250.000.000	DLH
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	50 Unit	250.000.000	DLH
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				DLH
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	850.000.000	DLH
		2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	1 dokumen	300.000.000	DLH
		01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	300.000.000	DLH
		2.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah KLHS	2 Dokumen	550.000.000	DLH
		01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	550.000.000	DLH
		02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen		DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/KEG	65,5/94,4/56,7/77,8/74,4	1.060.000.000	DLH
		2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Laporan	730.000.000	DLH
		01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKA: 64,3 IKU : 93,68 IKTL: 52,09	1 Dokumen 550.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen 180.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
		2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	terlaksananya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	100%	150.000.000	DLH
		01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 papan informasi	1 Laporan 150.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
		02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 buku/dokumen		DLH
		03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100%		DLH
		2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	1 Dokumen	180.000.000	DLH
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	1 Dokumen 180.000.000	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	75%	4.905.000.000	DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				Target	(Rp)				
	2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		75%	4.905.000.000	DLH		
	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen	445.000.000	DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)		
	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang terkelola	20 Ha	3.460.000.000	DLH		
	05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			DLH		
	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Terlaksana nya penanaman ( Di desa tunggal 1)	18 Unit (Taman)	1.000.000.000	DLH		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan		100%	500.000.000	DLH	
	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	500.000.000	DLH		
	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	1 Laporan	500.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	460.000.000	DLH	
	2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	460.000.000	DLH		
	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	20 Dokumen	140.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		
	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	2 Orang	65.000.000	DLH		
	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	132.000.000	DLH		
	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100%	1 Dokumen	123.000.000	DLH		
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		80%	200.000.000	DLH	
	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat		1 Dokumen	100.000.000	DLH		
	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100%	1 Dokumen	100.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN		
	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina		1 Kelembagaan	100.000.000	DLH		
	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		1 Dokumen	100.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN		
2	11	08	2.01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkatkan pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup		80%	140.000.000	DLH
	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah sosialisasi/pelatihan		6 sekolah	140.000.000	DLH		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	(Rp)		
	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tunggal)	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	140.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
2	11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	70%	180.000.000		DLH
	2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD		1 Dokumen	180.000.000		DLH
	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 dokumen	1 Entitas	180.000.000	DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN	DLH
2	11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI</b>	100%	160.000.000		DLH
	2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	160.000.000		DLH
	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	3 Dokumen	80.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100%	3 Dokumen	80.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
2	11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	85%	16.760.000.000		DLH
	2.01 Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah		85%	16.760.000.000		DLH
	01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Perbup Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018	2 Dokumen	300.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
	03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.425 Ton/M <sup>3</sup> /320 / 19 orang	78.000 Ton	8.000.000.000		DLH
	04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		10 Kelompok	160.000.000		DLH
	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	100%				DLH
	06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 rekomendasi				DLH
	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 TPST3R/Dumptruc k 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ bacholder 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan	1.120 Unit	8.300.000.000		DLH
					37.437.015.000		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK 1/ Ivb  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026.

Rencana Kerja tahunan ini memuat program - program dan kegiatan - kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya Rencana Kerja Awal (RANWAL) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tahun mendatang.